



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 4 November 2021, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

**Syamsudin**, lahir Nanjungan, 12 Juni 1962, tempat kediaman di Jalan Enggano No. 04 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat di dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

*hal 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No. 2/Pdt.G.S/2021/PA.Bn*



Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 belum dilunasi sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), maka Pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa BPKB Motor Honda Type NF11B1D M/T Tahun 2011 Nomor BPKB H-05867340 F a.n. Hennilda BD 3721 EO;

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.297.000.- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

*hal 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No. 2/Pdt.G.S/2021/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.**

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000.-
4. Biaya PNPB Rp. 20.000.-
5. Redaksi Rp. 10.000.-
6. Meterai Rp. 12.000.-

**J U M L A H Rp. 297.000.-**

*(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);*

hal 3 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No. 2/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)